

POLITIK PENDIDIKAN DAN KONSEP KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA

Raudoh¹, Atiah Almubarakah², Fina Amalia³, Fio Hasanda Putra⁴,
Isma Yuliza⁵, Najma Dianah Akmalia⁶
^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana,
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
raudhoh@uinjambi.ac.id¹, atiahalmubarakah46@gmail.com²,
finaamalia537@gmail.com³, hasandafio@gmail.com⁴,
ismayuliza20134@gmail.com⁵,
Najmadiana21@gmail.com⁶

ABSTRACT

Education is a strategic instrument for improving the quality of human resources and an inseparable part of public policy. In practice, educational implementation is influenced by political dynamics that determine the direction, objectives, and educational policies adopted by the government. Therefore, understanding educational politics and educational policy concepts is essential for analyzing the development of Indonesia's educational system. This study aims to describe the concept of educational politics, the scope of educational politics, educational policy, and the policy-making process within the national education system. This research employed a qualitative approach using the library research method. Data were collected from books, scientific journals, government regulations, and other relevant literature. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that educational politics refers to the government's process of determining educational direction through policies based on national ideology, community needs, and national development goals. The scope of educational politics includes policy formulation, educational management, educational financing, equal access to education, quality improvement, and policy evaluation. Educational policy is also an integral part of public policy that undergoes stages of problem identification, policy formulation, implementation, evaluation, and policy termination. Therefore, the success of the national education system is highly dependent on educational policies that are participatory, adaptive, and oriented toward improving educational quality

Keywords: Educational Politics, Educational Policy, Education System, Islamic Education, Public Policy

ABSTRAK

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik suatu negara. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh dinamika politik yang menentukan arah, tujuan, serta berbagai kebijakan yang

diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai politik pendidikan dan konsep kebijakan pendidikan menjadi penting sebagai dasar dalam menganalisis perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian politik pendidikan, ruang lingkup politik pendidikan, konsep kebijakan pendidikan, serta proses penyusunan kebijakan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui kajian terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang relevan dengan politik dan kebijakan pendidikan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik pendidikan merupakan proses penentuan arah penyelenggaraan pendidikan melalui kebijakan yang dibuat pemerintah berdasarkan ideologi negara, kebutuhan masyarakat, dan tujuan pembangunan nasional. Ruang lingkup politik pendidikan mencakup perumusan kebijakan, pengelolaan sistem pendidikan, pembiayaan pendidikan, pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta evaluasi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan juga merupakan bagian dari kebijakan publik yang melalui tahapan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi, hingga terminasi kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan sistem pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu Pendidikan.

Kata Kunci: politik pendidikan, kebijakan pendidikan, sistem pendidikan, pendidikan Islam, kebijakan publik.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, suatu negara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, pengembangan moral,

peningkatan keterampilan, serta pembentukan peradaban bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam sistem pemerintahan (Dewey, 1903).

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai dasar

kemajuan umat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang menerangkan bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي
الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا
فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan investasi utama dalam membangun kualitas manusia

sekaligus membentuk masyarakat yang beradab.

Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik yang berlangsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap perubahan pemerintahan sering kali diikuti dengan perubahan kebijakan pendidikan, baik dalam aspek kurikulum, sistem evaluasi, tata kelola pendidikan, pembiayaan pendidikan, maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang sangat dipengaruhi oleh keputusan politik pemerintah. Dengan demikian, politik pendidikan menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan pendidikan nasional.

Politik pendidikan pada hakikatnya merupakan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Politik pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dalam menentukan kebijakan, tetapi juga mencerminkan bagaimana negara

mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tantangan globalisasi. Kebijakan pendidikan yang dihasilkan akan menentukan kualitas layanan pendidikan yang diterima masyarakat.

Di Indonesia, berbagai kebijakan pendidikan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Reformasi kurikulum, penerapan desentralisasi pendidikan, kebijakan Merdeka Belajar, digitalisasi pembelajaran, hingga transformasi asesmen nasional merupakan contoh nyata bahwa pendidikan merupakan sektor yang dinamis dan selalu berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, budaya, serta politik. Setiap kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana

pendidikan, serta rendahnya pemerataan mutu pendidikan masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian pemerintah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan masih memerlukan penyempurnaan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

Keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga dipengaruhi oleh proses implementasi, dukungan para pemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis terhadap politik pendidikan dan konsep kebijakan pendidikan menjadi penting sebagai dasar dalam memahami bagaimana suatu kebijakan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pengertian politik pendidikan, ruang lingkup politik pendidikan dalam sistem pendidikan, konsep kebijakan pendidikan, serta proses penyusunan

kebijakan pendidikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, teori, dan kebijakan mengenai politik pendidikan serta kebijakan pendidikan berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang memanfaatkan berbagai literatur sebagai sumber utama dalam memperoleh data sehingga mampu menghasilkan kajian yang komprehensif terhadap suatu permasalahan.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai

referensi yang membahas politik pendidikan, kebijakan pendidikan, administrasi pendidikan, serta kebijakan publik. Referensi tersebut dipilih berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai politik pendidikan dalam sistem pendidikan Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, mengkaji, serta mengklasifikasikan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara sistematis agar setiap konsep yang diperoleh dari berbagai referensi dapat diinterpretasikan secara objektif sesuai tujuan penelitian.

Melalui pendekatan tersebut diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara politik pendidikan, kebijakan pendidikan, dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Politik Pendidikan sebagai Landasan Pengembangan Sistem Pendidikan Nasional

Politik pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional karena berkaitan dengan arah pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Pendidikan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, dinamika sosial, kondisi ekonomi, serta perkembangan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan pada dasarnya merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Secara konseptual, politik pendidikan merupakan perpaduan antara ilmu politik dan ilmu pendidikan. Politik berperan dalam menentukan arah pembangunan melalui kebijakan publik, sedangkan pendidikan menjadi sarana utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Dengan demikian, politik pendidikan dapat dipahami sebagai seluruh proses pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi kebijakan pendidikan (Dunn, 2015).

Dalam perspektif pendidikan nasional, politik pendidikan memiliki fungsi strategis dalam menentukan visi pendidikan Indonesia. Hal ini terlihat melalui berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan standar nasional pendidikan, kurikulum, sistem evaluasi, pembiayaan pendidikan, hingga kebijakan pemerataan akses pendidikan. Seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi politik pendidikan yang bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rozak & Az-Ziyadah, 2021).

Di Indonesia, politik pendidikan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan tersebut menjadi

pedoman dalam penyusunan kebijakan pendidikan sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, nasionalisme, dan spiritualitas peserta didik (Sujana et al., 2025). Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global.

Dalam perspektif Islam, politik pendidikan memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi (Alinata et al., 2024). Pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan, nilai keagamaan, dan perkembangan teknologi secara seimbang.

Keberhasilan politik pendidikan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam

merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pergantian pemerintahan seharusnya tidak mengubah tujuan utama pendidikan nasional, melainkan menjadi momentum untuk melakukan penyempurnaan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi yang objektif. Kebijakan yang terlalu sering berubah tanpa evaluasi yang matang justru berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, politik pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang bermutu tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, maupun wilayah tempat tinggal. Hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan nasional.

Ruang Lingkup Politik Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Ruang lingkup politik pendidikan sangat luas karena mencakup seluruh aspek

penyelenggaraan pendidikan. Politik pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kebijakan kurikulum, tetapi juga mencakup perencanaan pendidikan, tata kelola lembaga pendidikan, pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, serta evaluasi mutu pendidikan. Seluruh komponen tersebut saling berkaitan dalam membentuk sistem pendidikan nasional yang efektif (Sugiyarti et al., 2025).

Aspek pertama dalam ruang lingkup politik pendidikan adalah perumusan kebijakan pendidikan. Pemerintah melalui kementerian terkait menyusun berbagai kebijakan yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional. Kebijakan tersebut mencakup kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, hingga sistem asesmen nasional.

Aspek kedua adalah penentuan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan menjadi dasar seluruh aktivitas pendidikan di Indonesia. Politik pendidikan memastikan bahwa tujuan tersebut tetap selaras dengan nilai-nilai

Pancasila, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta tantangan globalisasi.

Selanjutnya, politik pendidikan juga mengatur pengelolaan sistem pendidikan melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi pendidikan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai karakteristik wilayah masing-masing tanpa mengabaikan standar nasional pendidikan (Khumaidi et al., 2024).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pembiayaan pendidikan. Pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara optimal. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru, bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta berbagai program peningkatan mutu pendidikan.

Selain pembiayaan, ruang lingkup politik pendidikan juga

mencakup penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah, sertifikasi guru, pengembangan kompetensi tenaga kependidikan, serta evaluasi terhadap capaian pembelajaran peserta didik. Penjaminan mutu menjadi indikator penting keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan.

Dengan demikian, politik pendidikan memiliki peranan yang sangat luas dalam menentukan keberhasilan sistem pendidikan nasional. Seluruh kebijakan yang dirumuskan pemerintah pada akhirnya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mewujudkan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara.

Kebijakan Pendidikan sebagai Instrumen Pembangunan Nasional

Kebijakan pendidikan merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang berfungsi mengatur penyelenggaraan pendidikan agar mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Keberadaan kebijakan pendidikan menjadi sangat penting karena pendidikan merupakan sektor strategis yang menentukan kualitas

sumber daya manusia suatu bangsa. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pendidikan harus dirancang secara sistematis berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan pembangunan nasional.

Secara konseptual, kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan yang dibuat pemerintah sebagai pedoman dalam mengelola seluruh komponen pendidikan. Kebijakan tersebut tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menentukan arah pengembangan kurikulum, peningkatan mutu guru, pemerataan akses pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana, sistem pembiayaan, hingga evaluasi pendidikan (Muid et al., 2025). Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Di Indonesia, kebijakan pendidikan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut menjadi dasar dalam setiap penyusunan kebijakan pendidikan nasional.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, pendidik, masyarakat, dunia usaha, dan orang tua juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor utama keberhasilan suatu kebijakan pendidikan.

Seiring perkembangan zaman, kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan kurikulum, penerapan digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, transformasi sistem asesmen, hingga kebijakan Merdeka Belajar merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan

pendidikan bersifat dinamis dan harus mampu menjawab tantangan perkembangan masyarakat.

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, serta rendahnya akses pendidikan di daerah terpencil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan.

Konsep dan Proses Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi terhadap hasil kebijakan. Kebijakan yang baik tidak lahir secara spontan, tetapi melalui serangkaian tahapan yang mempertimbangkan berbagai aspek akademik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, proses penyusunan kebijakan

pendidikan harus dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan partisipatif.

Secara filosofis, kebijakan pendidikan dibangun atas keyakinan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa. Pendidikan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan identitas bangsa. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta tujuan pembangunan nasional.

Dalam kajian kebijakan publik, proses penyusunan kebijakan pendidikan dikenal sebagai *policy cycle*. Tahapan pertama adalah identifikasi masalah, yaitu mengenali berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti rendahnya mutu pembelajaran, tingginya angka putus sekolah, ketimpangan akses pendidikan, atau kurangnya kompetensi pendidik (Duryat, 2022).

Tahap kedua adalah perumusan kebijakan. Pada tahap ini pemerintah bersama para ahli pendidikan, akademisi, organisasi profesi, dan berbagai pemangku

kepentingan menyusun berbagai alternatif solusi yang dapat diterapkan (Cahyanto, 2026). Setiap alternatif dianalisis berdasarkan manfaat, efektivitas, efisiensi, biaya, serta dampak yang mungkin ditimbulkan.

Tahap ketiga adalah penetapan kebijakan, yaitu proses pengambilan keputusan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai alternatif yang telah disusun. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun regulasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum.

Tahap berikutnya adalah implementasi kebijakan. Tahap ini menjadi bagian yang paling menentukan karena seluruh kebijakan mulai diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Implementasi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga masyarakat. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana,

komunikasi, serta koordinasi antar instansi.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi bertujuan mengetahui sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempertahankan, memperbaiki, atau mengganti kebijakan apabila ditemukan berbagai kelemahan dalam implementasinya.

Selain lima tahapan tersebut, terdapat tahap terminasi kebijakan, yaitu penghentian suatu kebijakan apabila dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman atau tidak lagi mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan. Terminasi bukan berarti kegagalan, melainkan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan agar pendidikan tetap berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Analisis Politik dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat dipahami bahwa hubungan antara politik dan pendidikan tidak dapat dipisahkan.

Setiap perubahan arah politik pemerintahan akan memengaruhi kebijakan pendidikan yang diterapkan. Oleh sebab itu, stabilitas politik sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan pendidikan nasional (Khamim et al., 2024).

Di sisi lain, kebijakan pendidikan yang efektif harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata kepentingan politik jangka pendek. Pergantian kepemimpinan seharusnya tidak selalu diikuti perubahan kebijakan pendidikan secara drastis, karena perubahan yang terlalu sering dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Dalam konteks pendidikan Islam, politik pendidikan juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak peserta didik yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter Islami, integritas, serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus mendukung pengembangan kurikulum yang

adaptif, peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penguatan pendidikan karakter.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan nasional sangat ditentukan oleh kualitas politik pendidikan dan kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah. Kebijakan yang dirumuskan secara partisipatif, berbasis bukti (*evidence-based policy*), berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan dievaluasi secara berkelanjutan akan mampu menghasilkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa politik pendidikan merupakan proses strategis dalam pengambilan keputusan yang mengarahkan penyelenggaraan pendidikan nasional agar selaras dengan ideologi negara, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman. Ruang lingkupnya mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penetapan tujuan pendidikan nasional, pengelolaan

sistem pendidikan, pembiayaan, pemerataan akses, peningkatan mutu, keterlibatan pemangku kepentingan, serta pengawasan dan evaluasi yang saling berkaitan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari kebijakan publik, kebijakan pendidikan disusun melalui tahapan yang sistematis mulai dari identifikasi masalah, perumusan, penetapan, implementasi, evaluasi, hingga terminasi sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk menjawab perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks pendidikan Islam, politik pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan mutu akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak mulia, dan penguatan nilai-nilai keislaman melalui integrasi ilmu pengetahuan dan nilai spiritual. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan nasional sangat ditentukan oleh kualitas politik pendidikan dan kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara partisipatif, berbasis kebutuhan masyarakat, didukung sumber daya yang memadai, serta dievaluasi secara

berkesinambungan guna mewujudkan pendidikan Indonesia yang bermutu, berkeadilan, dan berorientasi pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinata, R., Sari, W. A., & Putri, Y. K. (2024). Makna Pendidikan Dalam Perspektif Islam dan Relevansinya Dengan Pendidikan di Indonesia. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 1(3), 49–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v1i3.15>
- Cahyanto, I. (2026). *Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Pendidikan*. K-Media.
- Dewey, J. (1903). Democracy in Education. *Thr Elementary School Teacher*, 4(4), 193–204.
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Duryat, M. (2022). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Problem dan Solusi Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. K-Media.
- Khamim, S., Iswatir, Siregar, N., & Yaldi, Y. (2024). Pengaruh dan Tantangan Pendidikan Agama Islam dalam Dinamika Politik di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 2027–2042.
- Khumaidi, A., Hamdani, U. L., & Baharuddin. (2024). Evaluasi Dampak Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(4), 468–481. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/itjmie.v5i4.16859>
- Muid, A., Halizah, R. N., Rosiyah, & Waro, K. (2025). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam*, 15(15), 65–73.
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Alim: Journal of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Sugiyarti, N., Indriyani, L., & Duriyat, M. (2025). Understanding Politics, Policy And Education And The Scope Of Education Policy In Indonesia. *CIVITAS: Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic*, 11(1), 75–84.
- Sujana, I. G., Santika, I. G. N., Karmani, G., & Mesa, J. (2025).

Integrasi Prinsip-Prinsip
Pancasila dalam Perumusan
Kebijakan Hukum Nasional.

*IJOLARES: Indonesian Journal of
Law Research*, 3(2), 66–74.